

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia diketahui menjadi negara yang berada pada kategori negara kepulauan dengan dimiliki luas di wilayah perairan laut yakni pada presentase 75% yakni 17.500 Pulau dan diketahui dimilikinya garis pantai berada pada angka 81.000 km. Di wilayah perairan sendiri terkait luas yang dimiliki yakni berada pada angka 5,8 juta km² atau sama dengan 2/3 melalui luas wilayah yang dimiliki Indonesia, dengan diketahui di dalamnya mencakup Zona Ekonomi eksklusif yakni berada pada angka 2,7 juta km² diketahui terkait wilayah laut secara teritorial berada pada angka 3,1 juta km² (Aldi, 2015). Kekayaan terkait sumber daya yang dimiliki Indonesia yakni yang berasal dari laut diketahui bernilai sangat banyak, mulai dari biota laut yakni umumnya seperti ikan dan juga terumbu karang hingga pada sumber daya yang berkaitan dengan barang tambang yang diketahui berada pada wilayah dasar laut diketahui berlimpah. Pada wilayah pantai atau daerah pantai diketahui daerah yang secara spesifik, sebab wilayah terkait berada di antara dua pengaruh yakni mencakup pengaruh dari wilayah daratan dan juga dari wilayah lautan. Terkait kawasan pantai sendiri diketahui menjadi kawasan yang sifatnya dinamis dengan diketahui dimilikinya berbagai macam ekosistem hidup yang saling memiliki hubungan atau keterkaitan antara 1 dan yang lain.

Indonesia diketahui menjadi suatu negara yang memiliki kepulauan dengan terletak pada 4 lempeng tektonik, yakni terkait lempeng benua Asia, benua Australia dan, Samudra Hindia, dan Samudra Pasifik. Pada wilayah Selatan sendiri dan juga pada wilayah timur Indonesia, diketahui hadir sabuk vulkanik yang memiliki bentuk memanjang dari wilayah pulau Sumatera Jawa Nusa Tenggara sulawesi, dan terkait Sisinya sendiri berwujud pegunungan vulkanik yang berumur tua atau yang bersifat tua dan diketahui hadirnya dataran rendah dengan sebagian didominasi oleh wilayah rawa-rawa. Indonesia sendiri diketahui tepat berada pada titik pertemuan terkait tiga lempeng yakni tektonik yang Salim pertemuan atau bertabrakan, yakni Eurasia, lempeng indo-australia, dan juga lempeng Pasifik. Indonesia diketahui memiliki Rangkaian gunung api yang sifatnya aktif atau berperan sebagai Rangkaian gunung api aktif dengan dimilikinya total 140 gunung yang sifatnya aktif atau masih berstatus aktif (Haryo Praseno & Mahendra, 2021). Terkait keadaan yang telah dipaparkan diketahui Indonesia menjadi negara dengan kondisi bencana, seperti terjadinya letusan pada gunung api, hadirnya gempa bumi, fenomena tsunami, banjir, Selain itu pula terjadi tanah longsor, dan juga

fenomena angin puting beliung. Bencana alam yang hadir di Indonesia diketahui tidak berpaku pada musim atau tidak mengenal suatu musim. Terkait banjir dan juga banjir yang besar atau bandang, terkait juga tanah longsor, serta hadirnya angin puting beliung diketahui hadir pada musim hujan. Sedangkan pada musim, fenomena seperti terjadinya kebakaran pada hutan dan juga kebakaran pada lahan menjadi ancaman di musim tersebut. Sementara itu, terkait bencana letusan pada gunung yang masih aktif, terjadinya gempa dan juga hadirnya bencana tsunami diketahui sewaktu-waktu dapat hadir atau menjadi kewaspadaan untuk Indonesia. Hadirnya terkait ancaman bencana yang telah dipaparkan tentu memberikan tuntutan untuk hadirnya Suatu sikap kewaspadaan serta sikap siap siaga bagi seluruh pihak-pihak, baik di wilayah pemerintah dan juga pada masyarakat.

Pada upaya proses dan juga terkait hadirnya akibat melalui bencana yang ditimbulkan oleh alam diketahui secara jelas memberikan ancaman terhadap keselamatan masyarakat. Hal yang dapat dilakukan yakni melakukan upaya pencegahan, pula melakukan penanganan serta melakukan upaya penanggulangan terhadap bencana yang dihadirkan alam yang membutuhkan kehadiran dari negara (Burbano, 2015). Dengan secara sederhana, pihak-pihak pemerintah secara harus memberikan peran secara langsung pada tahap-tahap Upaya mitigasi terhadap bencana sebab bencana yang dihadirkan alam diketahui bukan menjadi tanggung jawab individu tetapi menjadi tanggung jawab bersama sebab hal ini berkaitan pada keselamatan secara publik.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diketahui memiliki tanggung jawab pada upaya diselenggarakannya usaha penanggulangan terhadap bencana dengan mencakup fokus terhadap pembangunan ulang atau rekonstruksi dan juga upaya rehabilitasi setelah bencana (Heryati, 2020). Jaminan mengenai upaya pemenuhan terhadap hak yang dimiliki masyarakat dan juga pihak-pihak pengungsi yang terdampak bencana dengan cara yang adil dan menyesuaikan pada standar yang telah dihadirkan terkait pelayanan yang secara harus diusahakan atau diupayakan, Hal ini sebagai upaya untuk melakukan antisipasi terhadap korban yang dapat mengalami peningkatan. Pada upaya pemulihan keadaan yang hadir sebab bencana dan juga upaya alokasi terhadap anggaran yang digunakan untuk melakukan penanggulangan terhadap hadirnya bencana yakni dalam anggaran dan juga pada Belanja Negara yang sifatnya memadai telah siap untuk dimanfaatkan dalam usaha melakukan pembangunan ulang atau rekonstruksi dan juga upaya melakukan rehabilitasi secara seharusnya menjadi suatu bagian jaminan bagi pihak-pihak yang terdampak dari bencana.

Diketahui terkait pola yang diaplikasikan dalam upaya melakukan penanggulangan terhadap bencana memperoleh suatu dimensi yang sifatnya baru dengan dikeluarkannya

undang-undang nomor 24 tahun 2007 yang berisi terkait penanggulangan bencana, peraturan dari kepala Badan Nasional di bidang penanggulangan bencana nomor 3 tahun 2008 mengenai pedoman terkait pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD dan juga terkait pada peraturan menteri dalam negeri dengan nomor 48 tahun 2008 yang di dalamnya berisi terkait pedoman organisasi dan juga tertata kerja BPBD yang disertai dengan beberapa aturan terkait pelaksana yang berkaitan, yakni terkait pada peraturan presiden yang berada pada nomor 8 tahun 2008 yang mengenai Badan Nasional penanggulangan bencana atau BNPB, peraturan yang dikeluarkan pemerintah yakni berada pada Nomor 21 Tahun 2008 yang berisi terkait upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana, peraturan yang dikeluarkan pemerintah pada nomor 22 tahun 2008 yang didalamnya mencakup terkait upaya pendanaan dan upaya pengelolaan terhadap pemberian bantuan bencana, dan peraturan yang dikeluarkan pemerintah nomor 23 tahun 2008 yang berisi terkait peran serta pihak-pihak lembaga internasional dan juga lembaga asing yang berada pada cakupan non pemerintah..

Terkait pada pembukaan dalam undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang terdapat pada alinea 4, mengamanatkan bahwa terkait pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia memberikan perlindungan terhadap bangsa dan juga keseluruhan tumpah darah Indonesia, dengan berupaya memajukan kesejahteraan secara umum, memberikan pendidikan sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga turut dilaksanakannya upaya ketertiban dalam segala dunia dengan berdasar pada kemerdekaan pada, upaya perdamaian dan juga pemberian keadilan secara sosial. Sebagai upaya melakukan implementasi terkait amanat yang telah dipaparkan dilaksanakannya upaya pembangunan yang berskala nasional dengan dimilikinya tujuan yang telah dirumuskan yakni untuk direalisasikannya masyarakat yang adil dan juga memperoleh kesejahteraan dengan senantiasa memberikan perhatian pada hak atas upaya penghidupan dan juga pemberian perlindungan bagi tiap-tiap warga negara yang berada dalam kerangka negara kesatuan RI.

Negara Indonesia diketahui terkait wilayah yang dimiliki bersifat luas dan juga berada pada garis khatulistiwa yakni tepatnya pada posisi silang yang terdapat antara dua benua dan juga pada dua samudra dengan terkait keadaan alamnya sendiri memiliki berbagai macam keunggulan yang ditawarkan, tetapi pada pihak lain diketahui posisinya Tengah berada pada wilayah yang terkait secara keadaan geografisnya sendiri, terhadap keadaan geologis, terkait keadaan secara hidrologi dan juga secara demografis rawan hadirnya bencana dengan dimilikinya frekuensi yang bernilai cukup tinggi dan norma sehingga dibutuhkan upaya penanganan yang sifatnya sistematis, secara terpadu dan juga telah terkoordinasi (Marfuah et al., 2021). Potensi yang hadir terkait penyebab bencana pada wilayah Indonesia diketahui dapat

diklasifikasikan menjadi tiga kelompok jenis bencana yakni bencana yang dihadirkan oleh alam, bencana yang tidak dihadirkan oleh alam dan juga bencana yang bersifat sosial. Bencana yang dihadirkan oleh alam diketahui dapat berwujud gempa bumi dan lain-lain. Kemudian untuk bencana yang tidak dihadirkan alam seperti terjadinya kebakaran pada hutan, kebakaran pada lahan yang hadir sebab kesalahan atau dilakukan oleh manusia. Selain itu bencana yang dihadirkan secara sosial yakni dalam wujud seperti kerusuhan secara sosial dan juga konflik sosial yang dihadirkan masyarakat yang kerap ditemui atau kerap terjadi. Pada upaya melakukan penanggulangan terhadap bencana menjadi satu dari beberapa bagian dari upaya pembangunan yang berskala nasional yakni dengan serangkaian aktivitas upaya penanggulangan terhadap bencana sebelum, pada saat setelah terjadinya bencana terkait.

Pada upaya melakukan penanggulangan terhadap bencana yang dihasilkan alam dengan memanfaatkan manajemen risiko dengan cara konseptual dapat dikaitkan pada teori yang telah disampaikan oleh W. H. Heinrich pada tahun 1931. Heinrich memiliki keresahan pada banyaknya korban terhadap kecelakaan yang dihadirkan di wilayah kerja yang tepatnya hadir di masa revolusi industri di wilayah Amerika lalu melakukan kajian dengan cara yang rinci melalui latar belakang hadirnya pada tiap-tiap kecelakaan yang terjadi. Kemudian dilakukannya upaya pencarian dan ditemukannya bahwa pada tiap-tiap kecelakaan di lingkungan kerja yang hadir selalu ditemukan 5 faktor yakni yang tahi fenomena tersebut yakni faktor sejarah hereditas dan agama kesalahan yang dilakukan manusia dan lingkungan terkait pada sikap dan juga terkait keadaan atau kondisi yang diketahui tidak aman, terkait pada kecelakaan kerja, dan juga dampak yang hadir dari kerugian.

Faktor hereditas dipahami sebagai bagian dari latar belakang individu seperti kurangnya pengetahuan yang dimiliki atau terkait yang dimiliki individu seperti keras kepala. Faktor terkait kesalahan yang dihadirkan manusia mencakup hadirnya motivasi yang rendah, tekanan atau stress, hadirnya konflik, terkait kompetensi diketahui yang sifatnya tidak sesuai atau berkaitan pada kesehatan dari pihak-pihak pekerja. Terkait pada faktor sikap dan juga kondisi yang dinilai tidak aman diketahui dapat berwujud dalam sikap kecerobohan dan tidak sesuai dengan prosedur kegiatan. Terkait pemberian pencahayaan yang dinilai kurang, alat yang digunakan untuk bekerja oleh pihak-pihak pekerja diketahui bernilai kurang layak, atau terkait rambu-rambu yang dihadirkan mengenai keselamatan untuk kerja tidak dihadirkan. Terkait pada faktor kecelakaan dalam kerja seperti terpeleset, terjadinya luka bakar dan juga tertimpa benda di wilayah tempat kerja yang terjadi sebab adanya kontak terhadap sumber dari bahaya. Faktor yang terakhir yakni dampak dari kerugian, mencakup cedera, cacat atau bahkan hingga mengalami kejadian kematian atau meninggal dunia.

Heinrich selanjutnya memberikan usulan, untuk melakukan pencegahan terkait hadirnya kecelakaan di wilayah kerja dengan mekanisme memberikan keputusan berupa untuk memutus terkait rantai sebab dan akibat. Usulan tersebut diketahui diaplikasikan pada wilayah industri dan juga di ketahui secara berhasil memberikan penurunan pada tingkat kecelakaan yang hadir dan juga terkait kerugian dengan sifatnya signifikan. Tokoh tersebut selanjutnya memberikan pernyataan bahwa terkait kontribusi yang bernilai besar yang menjadi penyebab terkait adanya kasus kecelakaan di lingkungan kerja oleh PBB bekerja yakni adalah berasal melalui faktor kelalaian yang dilakukan manusia dengan dimilikinya presentase 88%. Sementara terkait 10% yang lain yakni faktor yang dihadirkan sebab ketidak kelayakan aset atau properti atau barang yang dimiliki dan pada presentase 20% kehendak tuhan. Oleh karena itu, terkait presentasi 98% yang merupakan penyebab kecelakaan di lingkungan kerja yakni suatu tindakan yang dinilai tidak aman yang dapat dilakukan pencegahan oleh individu.

Cuman diketahui terkait gempa bumi tidak dapat dihentikan ya terjadi, tetapi dengan menghadirkan pengaruh terhadap faktor yang lain yang diketahui dapat menghadirkan kontribusi diketahui akan menghadirkan suatu pengurangan terkait frekuensi dan juga terkait tingkat pada kerugian yang diakibatkan oleh bencana tersebut (Davidson, 1997: 9). Tersebut diketahui yang menjadi motivasi kami untuk melakukan penguraian terkait upaya pengurangan terhadap risiko yang dihadirkan bencana terhadap infrastruktur pemerintah, Yakni dengan melalui upaya tahapan manajemen terkait risiko.

Pada provinsi dan juga kabupaten atau kota diketahui mulai melakukan pengembangan terkait kebijakan, penerapan terkait strategi dan juga upaya operasi terkait penanggulangan terhadap bencana menyesuaikan pada arah Upaya pengembangan terhadap kebijakan pada tingkatan nasional. Pada upaya tersebut atau upaya penanggulangan terhadap bencana di wilayah daerah diketahui Lucky Awali atau dimulai dengan hadirnya kebijakan yang dihadirkan daerah dengan tujuan yang telah dirumuskan yakni terkait upaya penanggulangan terhadap bencana menyesuaikan pada peraturan yang hadir. Strategi yang telah dilakukan penetapan oleh daerah dalam upaya melakukan penanggulangan terhadap bencana dibutuhkan dengan cara disesuaikan dalam kondisi atau keadaan daerah. Operasi terkait upaya penanggulangan bencana dalam skala nasional secara harus pasti berjalan sesuai atau bersifat efektif, secara efisien dan juga sifatnya kontinu atau berkelanjutan (Purnomo, Hadi 2007). Ada upaya untuk memberikan dukungan terkait Upaya pengembangan mengenai Sistem penanggulangan terhadap bencana yang didalamnya meliputi upaya kebijakan, terkait pada strategi dan juga operasi dalam tingkatan nasional yang didalamnya mencakup pemerintah di wilayah pusat dan juga di wilayah daerah maka perlu dilakukan tahapan awal atau dimulai

dengan dipahaminya sejalan mana pengaplikasian peraturan yang telah ditetapkan atau yang berkaitan dengan upaya penanggulangan terhadap bencana di wilayah daerah.

Wilayah geografis Kota Tual, Provinsi Maluku yang didominasi laut hingga mencapai 97 persen menjadikan wilayah tersebut masuk dalam potensi sebagai daerah rawan bencana. Kondisi wilayah serta kebutuhan masyarakat akan transportasi laut sebagai satu-satunya sarana penghubung semakin mempertegas hal tersebut. Apalagi dalam kondisi terpaksa atau mendesak, masyarakat sering kali mengabaikan kondisi alam atau cuaca khususnya pada bulan-bulan tertentu yang tergolong ekstrim sehingga sangat rentan terhadap kecelakaan transportasi laut. Dan akibatnya, berulang kali terjadi kecelakaan di laut hingga memakan korban jiwa maupun kerugian harta benda lainnya.

Berdasarkan letak geografis, wilayah Kota Tual memiliki spesifikasi keunggulan tersendiri dibandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia karena memiliki luas wilayah secara keseluruhan lebih kurang 19.088.39 Km dengan 97 persen didominasi laut dibanding daratan yang hanya berkisar 23 persen (Subandi, n.d.2018). Selain itu, Kota Tual dikelilingi gugusan pulau kecil sebanyak 66 pulau dengan rincian 13 pulau sudah berpenghuni sehingga kota Tual dikenal sebagai kota Kepulauan di Provinsi Maluku. Pemerintah Kota Tual sendiri membawahi 5 kecamatan dimana 3 diantaranya terletak di pulau-pulau terluar yang jangkauan jaraknya cukup jauh dari pusat Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Tabel 1.1 Jenis Bencana Alam Yang Sering Menimpa Kota Tual

No.	Jenis Ancaman Bencana Alam Di Kota Tual
1.	Angin Kencang
2.	Kebakaran
3.	Banjir Rob
4.	Tanah Longsor
5.	Angin Puting Beliung
6.	Laka Laut

Sumber : BPBD Kota Tual

BPBD Kota Tual setelah melakukan penyusunan terkait program untuk dapat dikurangnya risiko pada hadirnya bencana. Antara lain melakukan upaya lanjutan terkait upaya pembentukan kelompok pada masyarakat yang berfokus pada penanggulangan terhadap bencana di wilayah desa-desa dan dilanjutkannya pelaksanaan program mengenai pembentukan desa yang berada pada tingkatan tangguh bencana. Selain itu, melakukan upaya sosialisasi yang masih harus terus dilaksanakan di wilayah sekolah-sekolah lanjutan pada

tingkat atas dengan dibentuknya sekolah yang siap atau siaga terhadap bencana (Rusli & 'Ulya, 2018).

Kota Tual diketahui kerap kali terjadi bencana alam angin kencang dan banjir rob. Adapun terkait upaya yang dapat dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam upaya melakukan penanggulangan terkait bencana pada kota tersebut yakni dilaksanakannya upaya pemberian pelayanan terhadap masyarakat yang menjadi bagian dari dampak bencana, dengan disiapkannya tempat atau posko yang digunakan untuk tanggap darurat dan agama didirikannya dapur yang sifatnya umum, dihadirkannya kebutuhan secara dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu juga pemerintah di wilayah daerah berupaya melaksanakan perbaikan terkait sarana dan juga prasarana seperti perbaikan pada jalan dan juga rumah warga yang terdampak atau mengalami kerusakan secara berat serta melakukan penguatan pada tebing dan juga pemasangan mengenai bronjong. Hal ini menunjukkan bahwa terkait peran yang dimiliki pemerintah dalam upaya melakukan penanganan terhadap adanya bencana diketahui bernilai sangat besar dan juga menjadi hal yang serius demi untuk dijaganya dan juga dilindunginya masyarakat.

Ada upaya di atasnya banjir yang terjadi pada kota tersebut, telah dilaksanakan bermacam upaya untuk menanggulangnya. Upaya tersebut yakni upaya penanggulangan terhadap banjir dimulai dengan dilaksanakannya upaya pengerukan dan juga upaya melakukan pemasangan terkait buronjong yang diketahui setinggi satu setengah meter dengan dimilikinya panjang yakni 500 meter (Leslie & Spits, 2018). Hal tersebut dilaksanakan sebagai upaya untuk diperkecilnya terkait debit yang dimiliki tekanan air yang berada pada area sungai dan juga pada wilayah pesisir agar dapat ditampungnya pada keseluruhan atau dalam saluran pembuangan di wilayah perumahan-perumahan dan rumah setelah musim hujan selesai maka akan dilakukan upaya perencanaan pembangunan untuk yang sifatnya permanen dalam menahan air sungai. Pihak-pihak pemerintah diketahui mesti berdasar pada peta bahaya pada peta risiko terhadap bencana tanah, sehingga terkait Upaya mitigasi dan upaya melakukan peningkatan terkait kesiapsiagaan dapat secara mampu sesuai atau tepat pada sasaran. Melalui upaya kolaborasi pada dua sistem koordinasi tersebut, jika dilakukan dengan tanggung jawab dan juga dimilikinya rasa saling membutuhkan, maka diketahui akan menghadirkan atau terciptanya suatu bentuk keharmonisan dalam upaya manajemen suatu bencana.

Koordinasi yang dianggap ideal atau sifat yang ideal dalam upaya melakukan penanggulangan terhadap bencana yakni melakukan koordinasi yang secara mampu menjalin suatu kerjasama dan juga upaya komunikasi yang secara baik antara keseluruhan unit organisasi baik di wilayah internal maupun secara eksternal sehingga secara masing-masing

unit dari organisasi secara mampu melaksanakan terkait fungsi yang dimiliki dan juga tugas yang menjadi tanggung jawab sebagai upaya untuk dicapainya suatu efektivitas dalam upaya pelaksanaan dalam menanggulangi bencana (Rismawati, Usman, & Ma'ruf, 2015). Upaya koordinasi diketahui bernilai sangat penting dalam upaya melakukan penanggulangan terhadap bencana sebab dalam upaya pelaksanaan penanggulangan tersebut, satu unit organisasi yang diketahui tidak secara mampu menjalankan tanggung jawabnya sendiri tanpa berkaitan pada unit-unit yang lain atau unit-unit organisasi yang lain.

Penelitian ini akan membahas mengenai Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Bencana Alam. Hal tersebut menarik perhatian peneliti karena kesiapan dalam penerapan. Oleh karena itu, terdapat suatu pertanyaan penelitian yaitu “Bagaimana Peran BPBD Dalam Penanggulangan Bencana Alam Di Kota Tual.”

1.2 Rumusan Masalah

Dasar pada pemaparan mengenai latar belakang yang telah dipaparkan, maka terkait rumusan mengenai masalah yang akan dianalisis atau yang akan dipaparkan dalam kajian ini disajikan sebagai berikut:

Bagaimana peran BPBD dalam penanggulangan bencana alam kota Tual?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan

Ada pun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui peran BPBD dalam peran penanggulangan bencana.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi Mahasiswa.

- a. Dapat diaplikasikannya teori yang diperoleh melalui proses bukannya perkuliahan yang telah dilakukan.
- b. Dapat disiapkannya langkah-langkah yang menjadi kebutuhan untuk melakukan penyesuaian terhadap diri di wilayah lingkungan kerja.
- c. Dapat dilakukannya peningkatan terkait pengetahuan dan juga pengalaman yang dimiliki mahasiswa sebagai bekal untuk dimasukinya dunia atau wilayah kerja.

2. Bagi Perguruan tinggi

- a. Mendapatkan *supporting* SDM bagi penyelenggara kegiatan.
- b. Mendapatkan ide, inovatif dari mahasiswa.

1.4 Definisi Konseptual

1. Peran

Teori peran (*Role Theory*) kami sebagai suatu teori yang diketahui menjadi

perpaduan dari teori, terkait pada orientasi teknik, maupun berkaitan pada disiplin dari ilmu, diketahui selain dari psikologi, terkait teori peran sendiri dimulai dari dan juga Masih pada ketetapan atau masih digunakan dalam cakupan sosiologi dan juga pada cakupan antropologi. Ketiga ilmu tersebut, diketahui memiliki istilah peran yang diambil atau diadopsi melalui dunia teater. Pada teater sendiri diketahui seorang individu yang berperan sebagai aktor secara harus bermain menyesuaikan pada tokoh-tokoh tertentu yang telah ditetapkan dan pada posisi yang dimiliki sebagai tokoh tersebut ia diharapkan dapat bersikap atau berperilaku dengan cara yang tertentu.

Menurut Levinson sebagaimana dikutip oleh Soejono (2002:200), peranan sebagai suatu konsep mengenai apa yang dapat dilaksanakan oleh pihak-pihak individu yang sifatnya penting bagi struktur secara sosial di masyarakat, peranan sendiri diketahui mencakup norma-norma yang dilakukan pengembangan pada posisi atau tempat individu pada suatu masyarakat, peranan dalam pemahaman ini dipahami sebagai suatu bentuk rangkaian mengenai peraturan-peraturan yang memberikan bimbingan pada individu Dalam melakukan sosialisasi atau melakukan kehidupan sosial masyarakat.

2. Bencana Alam

Undang-undang yang berada pada nomor 24 yakni tahun 2007 menjelaskan bahwa terkait yang dimaksud dengan bencana yakni suatu bentuk peristiwa atau terkait Rangkaian peristiwa yang memberikan ancaman dan juga memberikan gangguan pada kehidupan dan juga penghidupan individu masyarakat yang hadir sebab dari faktor secara alam atau yang sifatnya non alam maupun faktor yang dilakukan oleh manusia atau disebabkan manusia sehingga menghadirkan akibat yakni berupa korban jiwa, kerusakan pada lingkungan, hadirnya suatu kerugian, dan juga dampak yang menyerang psikologis. Diketahui terdapat tiga jenis kategori pada bencana yang disajikan sebagai berikut:

- a) Bencana yang dihadirkan oleh alam yakni diketahui terkait penyebabnya sendiri seperti hadirnya bencana gempa bumi, banjir, dan bencana yang lainnya yang memberikan akibat pada kerusakan, kerugian, atau menyebabkan juga gangguan psikologis pada manusia.
- b) Bencana non-alam kami sebagai suatu bencana yang tidak dihadirkan alam atau peristiwa ini seperti kegagalan dalam teknologi, kegagalan dalam melakukan modernisasi dan juga terkait wabah penyakit.
- c) Makna yang dihadirkan secara sosial yakni hadir sebab dilakukan oleh individu atau manusia yang mencakup seperti konflik secara sosial atau antar kelompok yang terjadi di masyarakat atau antar komunitas.

BNPB (2014) bukan perincian menjadi 12 terkait jenis bencana yang seringkali hadir di Indonesia yakni seperti gempa bumi, letusan pada gunung yang masih aktif, terjadinya tsunami biasanya terjadi di wilayah pemukiman dekat pantai, atau terjadi pada wilayah yang berada di dekat laut, terjadinya gerakan pada tanah atau secara istilah juga dikenal sebagai suatu peristiwa tanah longsor, banjir yang umumnya disebabkan oleh hujan atau meluapnya air sungai, banjir dalam skala besar, terjadinya suatu fenomena kekeringan yang umumnya terjadi sebab musim kemarau tidak adanya hujan, terkait pada cuaca yang sifatnya ekstrem atau biasanya menghadirkan suatu fenomena puting beliung, terjadinya abrasi dan juga terkait gelombang yang bersifat ekstrem dan ekonomi kebakaran yang terjadi di hutan dan juga umumnya terjadi pada lahan, terjadinya juga pada fenomena epidemi dan juga hadirnya wabah penyakit yang menyerang masyarakat dan agama serta terkait fenomena kegagalan dalam teknologi. Diketahui terdapat faktor yang berjumlah 3 yang berperan sebagai penyebab hadirnya bencana yakni faktor dari alam atau sifatnya natural yakni sebab fenomena yang dihadirkan alam tanpa hadirnya campur tangan dari individu atau manusia, faktor yang hadir sebab non alam atau tidak kena alam dan bukan juga akibat dari apa yang dilakukan manusia, faktor yang sifatnya sosial yakni faktor yang umumnya atau murni dilakukan dari perbuatan manusia seperti konflik secara sosial atau secara horizontal, konflik terorisme dan juga secara vertikal.

3. BPBD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah diketahui sebagai suatu unsur untuk memberikan dukungan pada tugas yang dimiliki Kepala Daerah pada bidang penanggulangan terhadap bencana. Badan tersebut diketahui dipimpin oleh pihak Kepala Badan yang *ex officio* dijabat oleh sekretaris dari wilayah daerah dengan dimilikinya kedudukan di bawah dan juga memiliki tanggung jawab pada walikota.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dipahami sebagai lembaga yang berada di wilayah pemerintahan dengan sifatnya non departemen dengan dimilikinya tanggung jawab yaitu dilaksanakannya tugas untuk melakukan penanggulangan terhadap bencana di wilayah daerah baik pada provinsi maupun kabupaten atau kota dengan dimilikinya pedoman pada kebijakan yang telah dilakukan penetapan oleh BPBD. Badan tersebut diketahui dibentuk dengan berdasar pada peraturan yang dikeluarkan presiden yakni Nomor 8 Tahun 2008 dengan diketahui menjadi pengganti dari satuan koordinasi upaya pelaksanaan penanganan terhadap bencana pada tingkatan provinsi dan juga terkait pada satuan pelaksanaan terkait penanganan terhadap bencana pada tingkatan kabupaten atau kota, yang diketahui

keduanya dibentuk dengan berdasar pada peraturan yang dikeluarkan presiden yakni pada nomor 83 tahun 2005.

1.5 Definisi Operasional

Pada upaya dihadapkannya suatu bentuk pemahaman agar dapat dimudahkannya kajian atau penelitian yang dilaksanakan, maka perlu dihadapkannya suatu bentuk batasan pada kajian dan juga fokus pada penelitian yang dilakukan upaya pengoperasionalan melalui indikator yang dipaparkan sebagai berikut:

1. Peran Bpbd dalam Penanggulangan Bencana

Yang dimiliki oleh BPBD pada upaya melakukan penanggulangan terhadap bencana Adapun bencana yang dilakukan sebagai berikut:

- a. BPBD melaksanakan assessment kerusakan dan kerugian akibat hantaman ombak.
- b. BPBD melaksanakan assessment kerusakan dan kerugian akibat hantaman hujan deras dan angin kencang.
- c. BPBD melaksanakan assessment kerusakan dan kerugian pada rumah korban dan Pemkot Tual memberikan bantuan perbaikan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Menurut (Hasan M Iqbal 2002: 82) data primer dipahami sebagai suatu data yang didapatkan atau dilakukan pengumpulan secara langsung dari wilayah lapangan oleh individu yang melakukan atau melaksanakan pengkajian atau yang berkaitan pada hal yang menjadi kebutuhannya. Tetap primer diketahui diperoleh melalui pihak yang berperan sebagai informan yakni individu atau secara perseorangan seperti melalui hasil upaya wawancara yang dilaksanakan oleh pihak-pihak bank KC sehingga terkait data primer akan didapatkan melalui proses dilakukannya wawancara dan juga upaya observasi dengan cara yang langsung yang dilakukan oleh pengkaji atau peneliti selama aktivitas melakukan riset atau magang riset di BPBD kota Tual.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dipahami sebagai suatu upaya pengumpulan data yang dilakukan dengan cara yang tidak langsung melalui pemanfaatan media. Data tersebut umumnya diketahui dapat berupa atau berwujud catatan terhadap, atau dalam bentuk laporan secara historis yang telah dilakukan penyusunan atau telah tersusun pada arsip, baik yang telah diunggah atau dipublikasi dan yang sifatnya tidak dipublikasi atau tidak

diunggah. Manfaat yang dimiliki dari data sekunder sendiri yakni dapat lebih melakukan pemaksimalan terhadap biaya dan juga waktu sebab tidak perlu susah-susah datang secara langsung pada lokasi kajian dan juga dilaksanakannya wawancara. Jadi dapat dipahami bahwa data yang didapatkan melalui studi literatur atau melalui literatur maupun informasi yang dihadirkan dari media cetak atau dari media dari serta pengkaji dapat memperoleh data lain selain pada data utama dan juga umumnya dapat dilakukan perbandingan pada data 1 terhadap data yang lain.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Pada upaya melakukan pengumpulan data dilakukannya pengaplikasian teknik pengumpulan dalam kajian ini yakni berupa:

1. Observasi

Observasi dipahami sebagai suatu teknik pengumpulan terhadap data dengan dilakukannya upaya pengamatan dengan cara yang langsung terhadap objek yang menjadi kajian. Pada riset ini terkait upaya observasi dilakukan di BPBD Kota Tual.

2. Dokumentasi

Metode dokumenter dipahami sebagai suatu metode yang diaplikasikan untuk melakukan penelusuran terhadap data secara historis. Data tersebut yang menjadi maksud ialah data yang memiliki kegunaan dengan sifat bertahan lama dari sewaktu-waktu sehingga dapat menjadi bukti yang sifatnya akurat pada kajian. Dokumentasi pada kajian ini akan dihasilkannya suatu bentuk gambaran-gambaran yang sifatnya penting mengenai topik dari skripsi terkait.

3. Wawancara

Pada upaya dilakukannya wawancara yang merupakan teknik dari pengumpulan data yang dimanfaatkan oleh pengkaji untuk didatakannya penjelasan-penjelasan secara lisan melalui upaya tanya jawab dan juga secara berhadapan maka dengan individu yang dapat menghadirkan suatu informasi atau keterangan pada pengkaji. Wawancara di aplikasikan sebagai upaya untuk dilengkapinya data yang didapatkan melalui upaya observasi. Adapun terkait wawancara yang menjadi maksud yakni dengan melakukan upaya meminta terkait informasi dengan cara yang langsung terhadap tim BPBD yang berada di kota Tual mengenai bencana yang hadir. Tujuan yang dirumuskan mengenai hal ini yakni untuk dapat ditemukannya jawaban dari topik yang diangkat pada kajian ini.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi kajian atau penelitian dipahami sebagai suatu tempat dilaksanakannya pengambilan data atau pengkajian. Dimana hal itu bertujuan untuk memperoleh data dan informasi terkait permasalahan yang sedang diteliti. Pada penelitian ini dilakukan di Kota Tual. Adapun alasan dari peneliti memilih lokasi penelitian di Kota Tual karena Kota Tual dijadikan sebagai contoh bagi daerah-daerah lain di Indonesia dalam hal pelaksanaan pelayanan Bencana. Kegiatan penelitian ini dilakukan di beberapa lokasi terkait, yakni : Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Adapun alasan memilih instansi tersebut dikarenakan Dinas BPBD merupakan fasilitator sekaligus penanggungjawab segala urusan Bencana di kota Tual.

5. Subjek penelitian

Subjek dipahami sebagai hak yang memiliki peran untuk dimintai terkait keterangan dan juga terkait informasi yang berkaitan pada pembahasan yang akan diwafatkan pada kajian pada titik adapun terkait hal yang menjadi rencana Subjek pada kajian ini dipaparkan sebagai berikut:

- a. Drs Asis S.H Reliubun sebagai kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah kota Tual.
- b. Omar M Matdoan, S.kom, M.SI sebagai sekertaris BPBD Kota Tual
- c. Ridwan Letsoin, ST sebagai Kepala Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan BPBD Kota Tual
- d. Badadilah Kubangun sebagai Analisis Kebencanaan pada BPBD Kota Tual.

6. Analisa Data

Analisis data dipahami sebagai suatu upaya melakukan pengaturan dengan cara yang sistematis mengenai bahan hasil dari upaya observasi tanah melakukan upaya penafsiran dan juga upaya dihasilkannya Suatu bentuk pemikiran, terkait pendapat, teori atau berkaitan dengan gagasan yang sifatnya baru. Analisis dipahami sebagai suatu upaya pengelolaan terhadap data, Melakukan organisasi terhadap data, upaya melakukan pemecahan pada unit-unit yang sifatnya lebih kecil, dicarinya suatu pola dan juga tema-tema yang sifatnya sama. Analisis data dipahami sebagai suatu proses untuk melakukan organisasi dan juga melakukan pengurutan terkait data pada suatu pola, pada suatu kategori dan juga pada satuan uraian yang sifatnya dasar sehingga dapat ditemukannya tema dan juga dapat dilakukan perumusan terkait hipotesis kerja seperti yang telah disarankan oleh data. Pada pandangan umum atau secara umumnya proses penganalisisan terhadap data meliputi:

a. Reduksi Data

Reduksi data dipahami sebagai suatu proses melakukan pemilihan, upaya pemisahan, upaya pemberian perhatian dalam usaha melakukan penyederhanaan,

upaya pengabsahan dan juga terkait transformasi terhadap data yang sifatnya kasar yang hadir melalui catatan pencatatan secara tertulis dari lapangan. Reduksi data dilaksanakan pada kajian ini yakni mencakup dari hasil upaya wawancara dengan sumber informasi, dilakukannya upaya pengamatan terhadap dokumen-dokumen yang memiliki keterkaitan.

b. Penyajian Data

Ada upaya melakukan penyajian terhadap data dipahami sebagai suatu upaya penyusunan terhadap sekumpulan informasi yang didapatkan atau yang menghadirkan kemungkinan hadirnya upaya penarikan kesimpulan dan juga penarikan terkait pada tindakan.

c. Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian yang mengaplikasikan desain kualitatif, upaya penarikan terhadap kesimpulan untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan yang diketahui disimpulkan setelah dilakukan pengkajian atau penelitian di wilayah lapangan. Pada kajian atau penelitian ini, upaya penarikan mengenai kesimpulan dalam wujud teks dilakukan dengan dideskripsikan mengenai Bagaimana peran yang dimiliki pihak-pihak pemerintah di wilayah daerah pada upaya ditanggulangnya bencana yang dihadirkan alam pada wilayah Kota Tual.